

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Johan Jasin, 2019, *“Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah”*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Deddy Mulyani, 2015, *“Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik”*, Alfabeta, Bandung.
- Ridwan HR, 2016, *“Hukum Administrasi Negara”*, Rajawali Pers, Cetakan Keduabelas, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *“Perihal Perundang-undangan”*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2006).
- , 2005, *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2016, *“Penegakan Hukum”*, Academia.
- Agus Rahardjo, 2003, *“Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi”*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwanto, *at all*, 2012 *“Implementasi Kebijakan Publik”*, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia”, Cetakan Pertama Gava Media, Yogyakarta.
- Subarsono, 2013, *“Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Philipus M.Hadjon, 2010, *“Hukum Adminidtrasi dan Good Governance”*, Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Budi Winarno, 2012, *“Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)”*, CAPS, Yogyakarta.
- Rudianto et all, 2020, *“Kita dan Corona Catatan Kritis di Masa Pandemi Covid-19”*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Soerjono Sokanto, 2007, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2014, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram.
- Yulies Tina Marsriani, 2004, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *“Metode Penelitian Hukum”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ucuk Agiyanto, 2018, *“Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan”*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dr.Dini Dewi Herniarti (ed), 2017, *“Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”*, Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal Hukum:

Femmy Silaswaty, Suparwi, *“Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah”*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol.9 No.2, Universitas Islam Batik Surakarta, September 2019, hlm.24-25.

Sylvia Aryani, *“Eksistensi Peratuan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah”*, Badamai Law Journal Vol.2 Issues 1, Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kota Banjarbaru, Maret 2017, hlm.160.

Firdaus, *“Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah”*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.13 No. 1, Januari 2013, halaman.149.

Zahrah, ed., *“Implementasi Program Kelurahan Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”*, Journal of Publik Policy and Management Review Vol.6 No.2, 2017, hlm.88-100.

Wahid Eka Saputra, *“Pengaruh Pengorganisasian dan Koordinasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Timur”*, Jurnal Edunomika Vol.4 No. 2, 2020, hlm.3.

Mugni, Harjoni, *“Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Kebijakan Penghapusan Human Trafficking di Kota Lhokseumawe”*, Jurnal Ulticacomm Vol.12 No. 1, Juni 2020, ISSN:2085-4609 (Print), e-ISSN: 2656-0208.

Martinus, *“Efektifitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang”*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Media, Neliti, 2014, halaman.3.

Pradana, at all, *“Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan di Indonesia”*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol.09 No. 2, Juni 2020, hlm.65.

- Y Lestanata, Ulung Pribadi, *“Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015”*, *Jurnal of Governance and Public Policy* Vol.3 No. 3, 2016, hlm.368-389.
- Ulber Silalahi, *“Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik”*, *Jurnal Administrasi Publik* Vol.3 No. 1, 2004 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/652>, hlm.40-48.
- Nurul Hidayah Nasution, *“Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesian Health Scientific Journal”*, Vol.6 No.1 Juni 2021, halaman.108.
- Mahardika A dan kawan-kawan, *“Kedudukan Hukum Pemberlakuan PembatasanKegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, 2021, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Tulungagung, halaman.2.
- Susanto, Sri Nur Hari, *“Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi”*, *Administrative Law & Governance Journal* 2, No.1, 2019, hlm.139
- Harris Y.P.Sibuan, *“Penegakan Hukum Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali”*, Vol.XIII,No.13/I/Puslit/Juli 2021, Jakarta Pusat, halaman.3.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *“Penegakan Hukum”*, *Academia*, halaman 3-4.
- Sapto Wahyono, *“Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”*, *Jurnal Yustisia*, Vol.20 No.2 Desember 2019, halaman.176.
- Sanyoto, *“Penegakan Hukum di Indonesia”*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3 September 2008, halaman.200.
- Zulfa, Harriah MS, *“Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia”*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 7 No.1, Mei 2020, ISSN 2442-741.
- Ika Darmika, *“Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”*, *Jurnal Hukum*, 2019, halaman. 431.
- Rachmad Suprayetno, *“Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”*, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 2017, halaman.5-6.

- Dedy Suhendi, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”, Jurnal Tatapamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Maret 2019, halaman.35-36.
- Moh. Mahfud. MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 1.
- Nagara, Grahat, “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)” Jurnal Hukum Lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia 3, No. 2, 2017, hlm. 38.

Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Permendagri No. 17 Tahun 2017 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Inmendagri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
- Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19.
- Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-19 (COVID-19).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Bupati Pati No. 66 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Pati No. 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Pati.

Internet:

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Sebaran”,
<https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-18-juli-2021>

Jatengprov.go.id Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah,
<https://jatengprov.go.id/beritaopd/pelanggar-protokol-kesehatan-di-pasar-dan-terminal-bus-pati-disanksi-punguti-sampah/>, 02
September 2020, diakses pukul 09:00 WIB.

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja,
<https://satpolpp.jatengprov.go.id/v.2/sejarah/>, diakses pada
Tanggal 11 November 2021. Pukul 12:30 WIB

Fatimah Mardiyah, “Apakah yang dimaksud Protokol Kesehatan COVID-19 ?”,
[Protokol Kesehatan Adalah Aturan saat Pandemi Covid-19, Ini Isinya \(tirto.id\)](https://tirto.id/Protokol-Kesehatan-Adalah-Aturan-saat-Pandemi-Covid-19,Ini-Isinya), diakses pada 6 September 2021.

Kompas, “Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia”, 2 Maret 2021.

Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja,
<https://satpolpp.jatengprov.go.id/v.2/sejarah/>, diakses pada
Tanggal 11 November 2021. Pukul 12:30 WIB.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, (diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 1:00 WIB).

Mirwansyah Prawiranegara, “Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota (Konsep, Konteks, dan Komponen Pokok)”, Modul Hukum dan Administrasi Perencanaan, hlm.1.12.

Kabupaten Pati Tanggap Covid-19, “Peta Sebaran Kasus Covid-19 di Jawa Tengah”,
<https://covid19.patikab.go.id/v4/>, diakses pada 15
Agustus 2022, pukul 12:34 WIB.

https://smarcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/10736, diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 4:00 WIB.

Pemkab Pati Menambah Sanksi Denda Bagi pelanggar Prokes,
<https://www.republika.co.id/berita/qgijf2327/pemkab-pati-menambah-sanksi-denda-bagi-pelanggar-prokes>, diakses pada 23
Agustus 2022, pukul 23:45 WIB.

Wawancara:

Wawancara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Bapak Sugiyono, AP, MM.

Wawancara Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Arief Dharmawan, Sstp, MH.

Wawancara Seksi Pembinaan Pengawasan dan Sosialisasi, Bapak M Ichwan, SH.

Wawancara pelanggar protokol kesehatan, Bapak Muhammad Ridwan, PKL di Stadion Joyo Kusumo Pati.

Wawancara pelanggar protokol kesehatan, Bapak Selamat, PKL di Stadion Joyo Kusumo Pati.

Wawancara Sekertaris, Bapak Baru Pramono, S.sos.

Wawancara Seksi Penindakan, Ibu Endang Sulistyani, SH, MM.

Wawancara Seksi Operasi dan Pengendalian, Bapak Slamet, S.ip.

Wawancara Seksi Perlindungan Masyarakat, Bapak Sriyono, SH.

Wawancara Kasubbag Umum Kepegawaian, Ibu Kartini, SE, MM.

